



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO

EDISI RABU, 09 SEPTEMBER 2026

Ketua H. Abdullah Naash Wakil Ketua Suyarno, S.H., M.H. Wakil Ketua H. Kayan, SH Wakil Ketua Warih Andono, SE

RINGKASAN BERITA HARI INI

Pemkab Sidoarjo Akan Bentuk Satgas Awasi MBG

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Bupati Sidoarjo Subandi akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas tersebut akan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari bahan makanan tiba hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wisawa, Selasa (9/9/2026).
Subandi mengatakan, MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus didukung bersama. Namun, dukungan tersebut harus



dibarengi dengan pengawasan agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas. "Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masalah, pengemasan, sampai pengiriman," kata Subandi dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Menurut Subandi, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Di antaranya kesiapan dan kapasitas SPPG, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, distribusi, penerima manfaat hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Dia menegaskan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui koordinasi. Setiap SPPG juga harus menjalankan kegiatan sesuai standar operasional

yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar diminta tidak digunakan untuk memasak. "Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah," ujarnya.

Pengawasan, lanjut Subandi, harus dilakukan sejak bahan makanan diterima. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada proses pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian. Dengan pengawasan menyeluruh tersebut, ia berharap potensi persoalan dalam pelaksanaan MBG bisa segera diidentifikasi dan ditangani sebelum berdampak kepada penerima manfaat. Selain bahan makanan, kondisi sanitasi SPPG menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo. Subandi meminta seluruh SPPG diperiksa untuk memastikan lingkungan pengolahan makanan memenuhi standar kesehatan. "Yang lainnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan," jelasnya.

Subandi berharap satgas yang nantinya dibentuk dapat melakukan pengawasan secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa. "Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik," pungkaskan Subandi. (md/rus)

Kecewa, Subandi Enggan Biyai Korban SPPG

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi mengaku kecewa dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lari dari tanggung jawab. Pasalnya SPPG terkait lepas dari tanggung jawab biaya perawatan dan pengobatan ratusan pelajar dan santri yang jadi korban keracunan.

Subandi menambahkan bahwa seluruh korban keracunan selama ini ditanggung oleh pihak pemerintah kabupaten, padahal seharusnya tidak punya wewenang untuk menanggung saat terjadi musibah keracunan.

"Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda. Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab," kata Subandi, Rabu (9/9/2026).

Meski kecewa, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Dia berharap kejadian di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut secara nasional. "Program MBG bagus, niatnya mulia. Jangan sampai program yang baik ini termoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab," ujarnya.

"Kalau ada penyelenggara bermasalah, ya hentikan, ganti pengelola, dan beri sanksi. Kalau perlu dihentikan operasionalnya selama 30 hari, supaya penyelenggara lebih berhati-hati," imbuhnya.

Subandi juga meminta pemerintah pusat mendengarkan berbagai keluhan yang muncul di daerah. Menurutnya, perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas agar pemerintah daerah tidak hanya diberikan tugas mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. "Harus dibenahi dari akarnya. Perizinan wajib, pengawasan harus tegas, dan yang salah harus diganti," pungkaskan Subandi.

Korban keracunan MBG di Sidoarjo tercatat mencapai 748 orang, jumlah ini didasarkan dari update per Jumat, 4 September 2026 yang disampaikan Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuvantina. "Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. 20 pasien masih menjalani rawat inap atau MRS," ujar Lakhsmie. (md/rus)



Bupati Subandi saat sidang SPPG di Sidoarjo.

Percepat Pembangunan Flyover Gedangan, 122 Bidang Lahan Diukur

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan, Sidoarjo terus dikebut. Sebanyak 122 bidang lahan yang terdampak proyek kini mulai diukur dan dipetakan Pemkab Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengukuran tersebut menjadi tahapan awal sebelum proses penilaian harga tanah atau appraisal. Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada 2026, sehingga pembangunan fisik flyover bisa dimulai pada 2027.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pengukuran bidang tanah harus segera diselesaikan agar



Simpang Tiga Gedangan, Sidoarjo.

proses selanjutnya, termasuk appraisal dan pembayaran ganti rugi, tidak mengalami keterlambatan.

"Setelah pengukuran dan pemetaan selesai, akan dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin percepatan dikebut sehingga

pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak molor," kata Subandi, Rabu (9/9/2026).

Pembk Sidoarjo juga telah menyiapkan anggaran Rp 225 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung proses pembebasan

lahan. "Dana segitu belum cukup karena diperkirakan butuh sekira Rp 450 miliar. Nah, kekurangannya atau kebutuhan dana yang belum terselesaikan tahun akan dilanjutkan melalui penganggaran pak 2027," ungkap Subandi.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marg dan Sumber Daya Air (PUBMSD) Kabupaten Sidoarjo M. Makhsu mengatakan pengukuran lahan dilakukan secara bertahap. Dalam sehari, petugas menargetkan selatar 20-25 bidang tanah. "Sebanyak 122 bidang tanah telah terdapat sebagai lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Dari tersebut diperoleh setelah Pemku Sidoarjo melakukan verifikasi faktual terhadap pemilik lahan. Sekarang kita mulai pengukuran berikutnya." (md/rus)

Antisipasi Genangan Air, Pemerintah Kelurahan Sekardangan Lakukan Pekerjaan Pemasangan U-Dite

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah suatu keadaan dimana lingkungan tersebut bebas dari kotoran dan penyakit sehingga lingkungan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat.

Selain itu aspek lingkungan itu sendiri memberikan peran penting dalam menciptakan lingkungan bersih yang sehat, seperti ketersediaan saluran Drainase pada jalan lingkungan kelurahan, jika struktur tanah lingkungan itu rendah maka ketika musim penghujan tiba maka musim penghujan di lingkungan tersebut dengan mudah cepat tergenang air, di samping itu jalan lingkungan yang sering tergenang air dalam waktu yang lama akan mempengaruhi kekuatan struktur tanah jalan tersebut.

Berdasarkan uraian singkat

dias, dengan melihat situasi lingkungan masyarakat Kelurahan Sekardangan kecamatan Sidoarjo kalau musim hujan sering tergenang air hujan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun infrastruktur resapan yang memadai, maka sesuai dengan program kerja kelurahan, pemerintah Kelurahan Sekardangan merealisasikan pembangunan saluran Drainase dengan infrastruktur U - Ditch pada Wilayah rawan genangan air dengan tujuan menyediakan infrastruktur tepat guna bagi masyarakat pada saat musim hujan, serta menciptakan estetika lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam keterangannya pelaksanaan pekerjaan menyampaikan "Pemasangan Drainase U - Ditch dengan menggunakan pelat penutup yang dibuat sesuai dengan

garis dan elevasi dan detail lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar, untuk Bagian permukaan dari saluran terbuka atau bagian permukaan pelat penutup kami laksanakan dengan profil yang rata" terangnya Sabtu (9/9).

Setelah U - Ditch terpasang Pada bagian sambungan kita tutup dengan Mortar dan yang belum terisi harus diisi dengan adukan, di lanjutkan dengan Penimbunan kembali pada lokasi galian pemasangan pada U - Ditch" tambahnya.

"Untuk Timbunan, dengan menggunakan bahan yang memenuhi ketentuan yang diberikan untuk Timbunan Pilihan, Bahan dari sirtu timbun atau kerikil yang bebas dari gumpalan lumpung dan bahan - bahan tetumbuhan serta yang tidak mengandung batu yang tertahan pada ayakan 25 mm," pungkaskannya. (Nang)



PEMAIN SENIOR: Ruben Sanadi berlatih di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas

SIDOARJO – Skuat Persipura Jayapura boyongan ke Sidoarjo. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu membawa semua elemen timnya. Rombongan sudah tiba di Kota Udang sejak awal bulan ini.



Kami memang akan menggelar laga home tanpa penonton karena masih menjalani sanksi. Tapi, kami akan berusaha untuk tetap maksimal."

Owen Rahardian
Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa

Kami juga beberapa kali menggelar latihan di Lapangan Jenggolo. Jadi, untuk fasilitas latihan, tidak ada masalah," kata Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa, Owen Rahardian, kepada Jawa Pos.

Sempat Pertimbangan Solo dan Semarang
Owen menyebut para pemainnya cukup nyaman berada di Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo dianggap punya fasilitas yang cukup lengkap. Apalagi, lokasi Stadion Gelora Delta sangat strategis. "Sebenarnya, kami sempat mempertimbangkan Solo atau Semarang sebagai home base. Tapi setelah berbagai pertimbangan, kami mantap memilih Sidoarjo," terangnya. Jadi, apa alasan utama Persipura memilih Sidoarjo sebagai kandang? "Karena secara akses penerbangan, rute Jayapura ke Surabaya adalah yang paling nyaman. Lalu, dari bandara (Juanda), kami bisa langsung direct ke Stadion Gelora Delta. Kalau di Solo atau Semarang, kami harus naik kereta dulu untuk sampai ke pusat kota," bebernya. (gus/ali)



2026 13.49

KAMIS Kliwon 10 SEPTEMBER 2026

SURABAYA

Ratusan Siswa Kembali Tumbang

■ Di Pati, 230 Murid SMP-MTs Dilarikan ke Puskesmas dan RS setelah Santap MBG

■ Di Sidoarjo, Ditemukan Makanan Terkontaminasi Bakteri

PATI – Kasus dugaan keracunan setelah menyantap menu makan bergizi gratis (MBG) kembali terjadi. Kemarin ratusan siswa di Pati, Jawa Tengah, harus mendapat penanganan medis setelah mengonsumsi menu MBG. Insiden tersebut terjadi di dua sekolah, yakni MTsN 3 Pati dan SMPN 1 Gembong. Berdasarkan informasi yang dihimpun *Jawa Pos Radar Kudus*, total korban dari dua sekolah itu mencapai 230 siswa. Rinciannya, 127 siswa MTsN 3 Pati dan 103 siswa SMPN 1 Gembong. Sejumlah guru yang ikut menyantap menu MBG juga mengalami gangguan kesehatan. Menu tersebut berasal dari Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Gembong 01 Ngembes. *Baca Ratusan... Hal 2*



PENANGANAN MEDIS: Puluhan siswa yang diduga keracunan menjalani perawatan di RSUD R.A.A. Soewondo, Pati, Jawa Tengah, kemarin (9/9).

Pemeriksaan para saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian sekaligus melengkapi pemberkasan perkara."

Anang Supriatna
Kapuspenkum Kejagung

Korupsi MBG, Kejagung Periksa Pegawai BUMN hingga Yayasan

KEJAKSAAN Agung (Kejagung) terus mendalami dugaan korupsi dalam tata kelola program MBG di Badan

Gizi Nasional (BGN). Dalam dua hari, tim penyidik Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana

Khusus (JAM Pidsus) memeriksa 11 saksi dari sejumlah instansi dan pihak swasta. *Baca Korupsi... Hal 2*

DUGAAN KERACUNAN MBG DI PATI

2 SEKOLAH TERDAMPAK

• MTsN 3 Pati 127 siswa

• SMPN 1 Gembong 103 siswa

• Total 230 siswa

GEJALA YANG DIALAMI

• Mual

• Sakit perut

• Pusing

• Diare

MENU MBG

• Nasi bakar • Ayam suwir • Tempe

ASAL MAKANAN

• SPPG Gembong 01 Ngembes

KRONOLOGI

• Selasa (8/9) Menu MBG dibagikan kepada siswa SMPN 1 Gembong dan MTsN 3 Pati.

• Siswa menyantap menu MBG untuk makan siang.

• Saat malam, sejumlah siswa mulai mengalami sakit perut, mual, pusing, hingga diare.

• Rabu (9/9) pagi, jumlah siswa yang mengalami keluhan bertambah. Siswa mulai mendapat penanganan medis.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

• Puskesmas Gembong overload, sebagian siswa dirujuk ke beberapa rumah sakit di Pati.

Jawa Pos

Ratusan Siswa Kembali Tumbang

Sambungan dari Hal 1

Kepala SMPN 1 Gembong Istiana menuturkan, pihak sekolah mengetahui adanya siswa yang mengalami gangguan kesehatan pada Rabu (9/9) pagi. Saat itu, sejumlah siswa berulang kali pergi ke kamar mandi karena mengalami sakit perut. Jumlah siswa yang mengeluh kemudian terus bertambah. "Awal tahunya malah tadi pagi. Anak-anak banyak yang ke kamar mandi. Semakin siang semakin banyak," ujar Istiana. Sekolah kemudian menghubungi Puskesmas Gembong. Namun, jumlah pasien melebihi kapasitas puskesmas. Sebagian siswa akhirnya dirujuk ke sejumlah rumah sakit, antara lain RSUD R.A.A. Soewondo Pati, RS Mitra Bangsa, dan KSH Pati. "Puskesmas sudah overload. Karena itu, anak-anak kita bawa ke beberapa rumah sakit," jelasnya. Istiana menjelaskan, menu MBG yang diterima sehari sebelumnya langsung dibagikan kepada siswa.



LEMAS: Petugas medis memeriksa siswa yang diduga keracunan MBG di RSUD R.A.A. Soewondo kemarin (9/9).

Sebab, pada kemasan makanan tercantum petunjuk agar menu dikonsumsi sebelum pukul 12.00 WIB. Biasanya, pembagian makanan dilakukan sebelum istirahat pertama sekitar pukul 09.30 WIB.

"Kalau di tray itu kan ada tulisannya, dimakan sebelum jam 12. Sehingga begitu makanan datang langsung kami berikan ke anak-anak," ungkapnya.

Saat menyantap makanan, siswa belum menunjukkan gejala gangguan kesehatan. Respons terhadap menu juga cukup baik. "Anak-anak awalnya enjoysaja. Biasanya malah ada yang minta tambah," katanya.

Keluhan baru muncul beberapa jam kemudian, terutama pada sore hingga malam hari. Pihak sekolah lalu mendata siswa yang mengalami gejala dan ber-

koordinasi dengan fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan.

Terlambat Dikirim

Insiden serupa terjadi di MTsN 3 Pati. Sebanyak 127 dari 565 siswa dilaporkan mengalami keluhan setelah mengonsumsi MBG. Mayoritas merupakan siswa kelas VIII dan IX.

Kepala MTsN 3 Pati Zaenal Arifin mengatakan, menu

MBG seharusnya diterima siswa sekitar pukul 11.20 WIB. Namun, distribusi dari SPPG Gembong 01 Ngembes baru tiba sekitar pukul 12.00 WIB.

"MBG dari SPPG ini datang terlambat, sekitar jam 12-an. Anak-anak yang biasanya jadwal makan jam 11.20 karena penjadwalannya demikian, sampai jam 12 belum datang," ujarnya.

Karena makanan datang terlambat, siswa lebih dulu melaksanakan salat Dzuhur sebelum menu dibagikan. Saat pertama menyantap makanan, siswa belum mengalami keluhan. Gangguan kesehatan baru muncul beberapa jam kemudian. Gejalanya antara lain sakit perut, mual, pusing, dan diare.

Keluhan mulai dirasakan sekitar pukul 23.00 WIB dan masih berlanjut hingga Rabu pagi. "Mulai jam 23.00 itu mulai sakit perut, kemudian berak ke belakang (diare), dari sering sampai tadi pagi anaknya," jelas Zaenal.

Sejumlah guru yang ikut mengonsumsi menu MBG juga mengalami keluhan serupa. Sekolah masih melakukan pendataan untuk memastikan jumlah warga sekolah yang terdampak.

Menu yang dibagikan di MTsN 3 Pati berupa nasi

bakar berisi ayam suwir dan tempe yang dipotong kecil-kecil.

Hasil Lab di Sidoarjo Keluar

Pemeriksaan laboratorium terkait kasus dugaan keracunan menu makan bergizi gratis (MBG) di Sidoarjo telah rampung. Hasilnya, ditemukan makanan yang positif terkontaminasi bakteri.

"Ada sejumlah item, lebih dari 10 item. Satu di antaranya menunjukkan positif (terkontaminasi bakteri, Red)," kata Ketua Satgas MBG Sidoarjo Muhammad Ainur kemarin. Ainur yang juga Plh Sekda Sidoarjo itu mengatakan, hasil pemeriksaan tersebut menjadi bahan pendukung investigasi untuk mengetahui penyebab kasus. Hasil laboratorium juga telah dikoordinasikan dengan kepolisian untuk disandingkan dengan pemeriksaan forensik.

Terkait pasien yang kembali mengalami keluhan, Ainur mengatakan kondisi setiap orang bisa berbeda. Daya tahan tubuh dan kepatuhan mengonsumsi obat dapat memengaruhi proses pemulihan.

"Daya tahan tubuh setiap orang kan berbeda-beda. Ke-

patuhan mengonsumsi obat juga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kondisinya," ujarnya. Namun, penyebab pasti gangguan kesehatan tersebut masih perlu ditelusuri lebih lanjut. Berdasarkan data per 9 September 2026 pukul 14.00 WIB, sebanyak 116 pasien telah mendapat penanganan di enam rumah sakit. 106 pasien sudah diperbolehkan pulang, sembilan masih menjalani rawat inap, dan satu pasien masih dalam observasi.

Para pasien ditangani di RSUD R.T. Notopuro, RSI Siti Hajar, RS Pusura Candi, RS DKT, RS Arafah Anwar, dan RS Rahman Rahim.

Kepala Dinkes Sidoarjo Lakhsme Herawati Yunita membenarkan adanya hasil pemeriksaan yang menunjukkan kontaminasi bakteri. Namun, jenis bakteri tidak disampaikan karena hasil pemeriksaan teknis tidak dirilis untuk publik.

Menurut dia, kontaminasi makanan dapat berasal dari berbagai faktor, seperti air, bahan baku, maupun kondisi lingkungan.

"Hasil detailnya tidak dirilis untuk publik. Yang pasti semua harus menjaga kesehatan," kata Lakhsme. (ful/mia/adr/oni)

Korupsi MBG, Kejagung Periksa Pegawai BUMN hingga Yayasan

Sambungan dari Hal 1

Kapuspenkum Kejagung

nya. Pada Selasa (8/9), penyidik memeriksa lima

den, dan akuntabel. Penyidik juga tetap menjunjung

Selain itu, penyidik menemukan dugaan penyim-

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



PEMAIN SENIOR: Ruben Sanadi berlatih di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Persipura Pilih Sidoarjo karena Akses dan Fasilitas

SIDOARJO – Skuad Persipura Jayapura boyongan ke Sidoarjo. Klub berjuluk Mutiara Hitam itu membawa semua elemen timnya.

Rombongan sudah tiba di Kota Udang sejak awal bulan ini.

Rencananya, mereka akan menetap di Sidoarjo sampai putaran pertama Championship 2026-2027 tuntas. Selama putaran pertama, Mutiara Hitam memang berkandang di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo.

Persipura juga sudah rutin menggelar latihan. Mereka sempat melakukan latihan di Stadion Gelora Delta.

"Kami juga beberapa kali menggelar latihan di Lapangan Jenggolo. Jadi, untuk fasilitas latihan, tidak ada masalah," kata Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa, Owen Rahardian, kepada *Jawa Pos*.



Kami memang akan menggelar laga home tanpa penonton karena masih menjalani sanksi. Tapi, kami akan berusaha untuk tetap maksimal."

Owen Rahardian

Presiden Direktur PT Nusantara Cenderawasih Karsa

Sempat Pertimbangkan Solo dan Semarang

Owen menyebut para pemainnya cukup nyaman berada di Sidoarjo. Sebab, Sidoarjo dianggap punya fasilitas yang cukup lengkap. Apalagi, lokasi Stadion Gelora Delta sangat strategis.

"Sebenarnya, kami sempat mempertimbangkan Solo atau Semarang sebagai *home base*. Tapi setelah berbagai pertimbangan, kami mantap memilih Sidoarjo," terangnya.

Jadi, apa alasan utama Persipura yakin memilih Sidoarjo sebagai kandang? "Karena secara akses penerbangan, rute Jayapura ke Surabaya adalah yang paling nyaman. Lalu, dari bandara (Juanda), kami bisa langsung *direct* ke Stadion Gelora Delta. Kalau di Solo atau Semarang, kami harus naik kereta dulu untuk sampai ke pusat kota," bebernya. (gus/ali)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Pranti 11 Tahun Menanti Sertifikat Tanah

Ajukan Pendaftaran sejak 2015, hingga Kini Belum Selesai

SIDOARJO – Sebanyak 200 warga yang tinggal di Jalan Rambutan, Desa Pranti, Sedati, wadul ke DPRD Sidoarjo, Selasa (8/9) sore. Mereka sudah belasan tahun menghuni rumah mereka. Namun, sertifikat tanah yang seharusnya dimiliki belum juga dikantongi.

Dari cerita, sebanyak 200 warga Pranti awalnya direlokasi karena terdampak perluasan Bandara Juanda. Mereka lantas mendaftarkan untuk mengurus sertifikat tahun 2015. Namun, prosesnya mandek hingga sebelas tahun.

Salah satu warga, Karmini berharap sertifikatnya segera diurus. Dia mengaku sudah membayar dan telah lama menanti dokumen. "Sekitar dua tahun lalu saya bayar Rp 2 juta ke perangkat desa. Uang hilang, sertifikat tak kunjung jadi," katanya pada *Jawa Pos* kemarin (9/9).

Berkali-kali Mengurus Administrasi

Kepala Desa Pranti Eko Purnomo menambahkan, seharusnya setelah menempati tanah relokasi warga mendapatkan kepastian terkait hak atas tanah tersebut. Namun, proses sertifikasi ternyata berjalan panjang. "Peta bidang ta-

nah sebenarnya sudah dibuat sejak 2015. Meski demikian, sertifikat yang dinantikan warga belum juga terbit," kata Eko.

Panjang proses tersebut membuat warga harus berulang kali mengurus administrasi. Berkas yang diajukan sejak 2015 sempat diminta dicabut dan diajukan kembali setelah terjadi pergantian pimpinan serta perubahan kebijakan di BPN.

Warga pun kembali harus melengkapi administrasi dan membayar Surat Perintah Setor (SPS). Penantian itu sempat memberikan harapan pada 2023. Eko mengaku saat itu pernah melihat sertifikat warga yang sudah dicetak. Namun, dokumen tersebut belum ditandatangani karena terjadi pergantian pimpinan BPN.

Verifikasi Berkas Permohonan

Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran Wilayah 4 BPN Sidoarjo Suwoko mengatakan, BPN sedang mengecek dokumen. Proses analisis dan verifikasi membutuhkan waktu sekitar satu minggu. "Kami membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk menganalisis dan memverifikasi berkas permohonan," katanya. (ful/hen)



LAMA MENUNGGU: Karmini, salah satu warga Pranti, berharap sertifikat tanah miliknya segera diproses BPN. Ada 199 warga yang juga menunggu SHM.



Sekitar dua tahun lalu saya bayar Rp 2 juta ke perangkat desa. Uang hilang, sertifikat tak kunjung jadi."

Karmini
Warga Pranti



Kami membutuhkan waktu sekitar satu pekan untuk menganalisis dan memverifikasi berkas permohonan."

Suwoko
Kasi Penetapan Hak dan Pendaftaran Wilayah 4 BPN Sidoarjo



Ada 97 berkas yang sudah siap ditindaklanjuti. Tolong diselesaikan."

Rizza Ali Faizin
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo

Sebagian Pemohon Telah Meninggal

BADAN Pertanahan Nasional (BPN) menindaklanjuti aduan soal lambatnya pembuatan sertifikat lahan milik warga Desa Pranti. Mereka perlu waktu sepekan untuk verifikasi. DPRD Sidoarjo mendesak BPN untuk segera menuntaskan proses sertifikasi.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin berharap masalah sertifikat tidak berhenti pada proses administrasi. Pembuatan dokumen harus tuntas. Sebab warga sudah lama menanti.

"Ada 97 berkas yang sudah siap ditindaklanjuti. Tolong diselesaikan," kata Rizza. Dia menegaskan, legislator akan mengawal proses sertifikasi. "Jika seminggu tak ada perkembangan yang jelas, kami akan cek ke BPN," tambah Rizza.

Ketua DPC PKB Sidoarjo itu menjelaskan, perlu pendataan kembali pemilik lahan di lokasi. Itu karena sebagian pemohon telah meninggal. Ahli waris harus segera melengkapi dokumen permohonan. (ful/hen)



Bangunan di lahan relokasi



Ada 200 pemilik lahan yang belum bersertifikat



Mereka mengurus sejak 2015

Sumber: Informasi Warga Pranti

GRAFIK: ADITI/JAWA POS

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

200 KK di Gempolsari Krisis Air Bersih

SIDOARJO – Setidaknya ada hampir 200 KK dari lima RT di Desa Gempolsari, Tanggulangin, mengalami krisis air bersih. Khususnya, warga yang berada di dekat tanggul Lumpur Sidoarjo yakni di RT 11 dan RT 16.

Kepala Desa (Kades) Gempolsari Ali Murtadho mengungkapkan, hampir sebagian besar warganya menggunakan air sumur untuk keperluan sehari-hari. Kebutuhan air bersih menjadi kendala sejak semburan lumpur. "Sumur

warga tercemar dan tidak bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi harus beli air bersih dari pengecer untuk memenuhi kebutuhan," katanya.

Dari laporan warga, kondisi air sumur berwarna kuning, terasa asin, dan mengeluarkan bau tidak sedap. "Ini yang berada di sekitar tanggul," imbuh Ali. Kondisi tersebut membuat warga harus mengeluarkan biaya tambahan sekitar Rp 30 ribu setiap hari untuk mendapatkan air bersih. Ali mengung-



AKSI SOSIAL: Dua anggota Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jatim mengangkut air bersih untuk warga RT 16 Desa Gempolsari.

kapkan, banyak warga yang mengharapkan adanya bantuan rutin air bersih.

Wadanki Kompi 3 Batalyon A Pelopor Satbrimob Polda Jatim Ipda Moham-

mad Zayyadi mengungkapkan, penyaluran air bersih dilakukan selepas adanya laporan dari warga dan peninjauan ke lokasi. Ada sekitar 8.000 liter air bersih yang disalurkan untuk ratusan warga di Gempolsari tersebut.

Menurut Zayyadi, masih ada 30.000 liter air yang bakal disebar ke beberapa titik lainnya. "Setelah berkoordinasi dengan Kades Gempolsari, kami akan mengusahakan kegiatan berlanjut ke depan," paparnya. (eza/hen)

Jawa Pos



BPPD SIDOARJO

BELUM LUNAS: Petugas BPPD Sidoarjo memasang stiker peringatan di salah satu gerai yang menunggak pajak.

Menunggak Pajak, 45 Gerai Dipasang Stiker Peringatan

SIDOARJO – Masih ada banyak gerai makanan dan minuman yang menunggak pajak daerah di Kota Delta. Selama Januari-September 2026, Badan Pelayanan Pajak Daerah (BPPD) Sidoarjo telah memberi peringatan 45 gerai yang bandel. Petugas memasang stiker untuk mengingatkan pemilik gerai.

Pemeriksa Pajak Ahli Muda BPPD Sidoarjo Hermadi Listiawan mengatakan, terdapat dua jenis stiker yang digunakan yakni bertuliskan belum lunas pajak dan dalam pengawasan. Stiker belum lunas diberikan kepada wajib pajak yang belum membayar kewajiban. Sementara itu, stiker dalam pengawasan ditujukan bagi pelaku usaha yang menolak pemasangan alat perekam transaksi atau belum memberikan akses data transaksi sebenarnya.

"Penempelan stiker tidak dilakukan secara tiba-tiba. Sebelumnya, wajib pajak

diberikan surat teguran dan pemberitahuan penindakan," kata Hermadi. Menurut dia, langkah tersebut cukup efektif mendorong wajib pajak melunasi tunggakan. Banyak pelaku usaha yang langsung membayar setelah stiker ditempel.

Penertiban pajak menyasar sejumlah sektor usaha, termasuk gerai makanan dan minuman. BPPD juga mengoptimalkan taxmon untuk mencocokkan transaksi dengan laporan wajib pajak. Selain itu, petugas mengumpulkan sampel struk sebagai bahan verifikasi serta mengajak masyarakat menyerahkan bukti transaksi.

Upaya penertiban tersebut menjadi bagian dari langkah BPPD mengejar target penerimaan pajak daerah 2026 sebesar Rp 1,722 triliun. Hingga pertengahan September, realisasi penerimaan mencapai Rp 1,204 triliun atau 69,94 persen. (ful/hen)

Jawa Pos

Pembuat Upal Jualan lewat Facebook

Juga Sediakan Bentuk Buket

SIDOARJO – Uang palsu (upal) sebanyak Rp 298.520.000 disita Polsek Taman bersama Polresta Sidoarjo. Dua pelaku yang bermukim di Karanganyar menjual upal melalui Facebook dengan harga Rp 500 ribu untuk Rp 2 juta upal hingga Rp 1 juta untuk Rp 8 juta upal. Mereka juga menjual buket uang palsu sebagai hadiah acara.

Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq mengatakan, penangkapan pelaku ES, 42, dan DBS, 33 itu hasil pengembangan dari ungkap kasus sebelumnya dengan tersangka MS, 38. Warga Sawahan itu menggunakan upal untuk berbelanja di Tanjungsari, Kecamatan Taman. Dia mengaku membeli upal itu dari akun Facebook bernama Misali Lili.



HANYA MAINAN: Wakapolresta Sidoarjo AKBP M. Zainur Rofiq (dua dari kiri) menunjukkan buket bunga yang disusun dari uang palsu.

"Kami kemudian mendapati bahwa penjual ini bertempat tinggal di Karanganyar," katanya.

Dua pelaku ditangkap di sebuah rumah yang sekaligus menjadi tempat produksi uang palsu. Polisi juga mengamankan peralatan mulai printer, pres manual hologram, pendeteksi ultraviolet, dan ribuan kertas kue. Juga ada buket uang yang siap edar. Dari informasi yang dihimpun, pelaku dulu menjual buket uang mainan untuk sekadar buah tangan atau hadiah. Tapi, mereka

tergiur menjual uang palsu karena ada yang mau membeli untuk dipakai transaksi.

"Mereka menawarkan uang palsu di Facebook, kemudian diarahkan ke chat dan transfer uang," katanya.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur Ridzky Prihadi Tjahyanto mengungkapkan, sudah memeriksa 1.383 lembar uang beragam nominal dan emisi. "Untuk kualitasnya rendah sekali, dan sangat bisa dibedakan dengan kasatmata," katanya. (eza/jun)

Jawa Pos



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Percepat Pembangunan Flyover Gedangan, 122 Bidang Lahan Diukur

Sidoarjo – HARIAN BANGSA
Pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan, Sidoarjo terus disebut. Sebanyak 122 bidang lahan yang terdampak proyek kini mulai diukur dan dipetakan Pemkab Sidoarjo bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Pengukuran tersebut menjadi tahapan awal sebelum proses penilaian harga tanah atau appraisal. Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada 2026, sehingga pembangunan fisik flyover bisa dimulai pada 2027.

Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan pengukuran bidang tanah harus segera diselesaikan agar



Simpang Tiga Gedangan, Sidoarjo.

proses selanjutnya, termasuk appraisal dan pembayaran ganti rugi, tidak mengalami keterlambatan.

“Setelah pengukuran dan pemetaan selesai, akan dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin prosesnya dipercepat sehingga

pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak molor,” kata Subandi, Rabu (9/9/2026).

Pemkab Sidoarjo juga telah menyiapkan anggaran Rp 225 miliar melalui APBD 2026 untuk mendukung proses pembebasan

lahan. “Dana segitu belum cukup, karena diperkirakan butuh sekira Rp 450 miliar. Nah, kekurangannya atau kebutuhan dana yang belum terselesaikan tahun akan dilanjutkan melalui penganggaran pada 2027,” ungkap Subandi.

Lebih lanjut, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo M Makhmud mengatakan pengukuran lahan dilakukan secara bertahap. Dalam sehari, petugas menargetkan sekitar 20-25 bidang tanah. “Sebanyak 122 bidang tanah telah terdata sebagai lahan yang terdampak pembangunan Flyover Gedangan. Data tersebut diperoleh setelah Pemkab Sidoarjo melakukan verifikasi faktual terhadap pemilik lahan. Sekarang kita mulai pengukuran,” bebernya. (md/rus)

Jawa Pos

Pemkab Sidoarjo Akan Bentuk Satgas Awasi MBG

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi akan membentuk satuan tugas (satgas) untuk memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Satgas tersebut akan mengawasi seluruh tahapan pelaksanaan MBG, mulai dari bahan makanan tiba hingga makanan didistribusikan kepada penerima manfaat.

Hal itu disampaikan Subandi saat memimpin rapat koordinasi bersama Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, seluruh koordinator wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) se-Sidoarjo, serta Koordinator Wilayah KPPG Surabaya di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9/2026).

Subandi mengatakan MBG merupakan salah satu program strategis nasional yang harus didukung bersama. Namun, dukungan tersebut harus

dibarengi dengan pengawasan agar makanan yang diterima masyarakat benar-benar aman dan berkualitas.

"Satgas Kabupaten Sidoarjo akan kita bentuk. Kita harus tahu proses MBG. Mulai bahan datang, pengolahan, penyelesaian masakan, pengemasan, sampai pengiriman," kata Subandi dalam keterangannya, Rabu (9/9/2026).

Menurut Subandi, terdapat sejumlah hal yang harus menjadi perhatian dalam pelaksanaan MBG. Di antaranya kesiapan dan kapasitas SPPG, kualitas bahan makanan, keamanan pangan, distribusi, penerima manfaat hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.

Dia menegaskan pengawasan tidak cukup hanya dilakukan melalui koordinasi. Setiap SPPG juga harus menjalankan kegiatan sesuai standar operasional



Bupati Sidoarjo Subandi.

prosedur (SOP). "Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan," tegasnya.

Subandi juga meminta pengelola SPPG lebih ketat dalam melakukan pemeriksaan bahan makanan. Bahan

yang kondisinya sudah tidak memenuhi standar diminta tidak digunakan untuk memasak. "Kalau bahannya tidak bagus, jangan digunakan. Jangan sampai bahan yang tidak bagus tetap diolah, akhirnya yang menjadi korban adalah masyarakat dan pemerintah," ujarnya.

Pengawasan, lanjut Subandi, harus dilakukan sejak bahan makanan diterima. Pemeriksaan kemudian dilanjutkan pada proses pengolahan, pengemasan hingga pendistribusian.

Dengan pengawasan menyeluruh tersebut, ia berharap potensi persoalan dalam pelaksanaan MBG bisa segera diketahui dan ditangani sebelum berdampak kepada penerima manfaat.

Selain bahan makanan, kondisi sanitasi SPPG menjadi perhatian Pemkab Sidoarjo.

Subandi meminta seluruh SPPG diperiksa untuk memastikan lingkungan pengolahan makanan memenuhi standar kelayakan.

Bahkan, pemeriksaan ulang tetap perlu dilakukan terhadap SPPG yang telah menyelesaikan proses perizinannya. "Yang izinnya sudah selesai juga dicek kembali, apakah sanitasinya layak atau tidak. Ini penting untuk menjaga kesehatan," jelasnya.

Subandi berharap satgas yang nantinya dibentuk dapat melakukan pengawasan secara terkoordinasi dengan melibatkan perangkat daerah terkait hingga tingkat kecamatan dan desa. "Program Pak Presiden ini harus sukses di Sidoarjo. Kita harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik," pungkas Subandi. (md/rus)

Kecewa, Subandi Enggan Biayai Korban SPPG ✓

Sidoarjo – HARIAN BANGSA

Bupati Sidoarjo Subandi mengaku kecewa dengan pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang lari dari tanggung jawab. Pasalnya SPPG terkait lepas dari tanggung jawab biaya perawatan dan pengobatan ratusan pelajar dan santri yang jadi korban keracunan.

Subandi menambahkan bahwa seluruh korban keracunan selama ini ditanggung oleh pihak pemerintah kabupaten, padahal seharusnya tidak punya wewenang untuk menanggung saat terjadi musibah keracunan.

“Tanggung jawab hukum harus jatuh kepada penyelenggara SPPG, bukan pemda. Ketika ada warga yang sakit akibat makanan yang disalurkan, penyelenggara harus bertanggung jawab, bukan lari dari tanggung jawab,” kata Subandi, Rabu (9/9/2026).

Meski kecewa, Subandi menegaskan Pemkab Sidoarjo tetap mendukung program MBG yang merupakan program pemerintah pusat. Dia berharap kejadian di Sidoarjo menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program tersebut secara nasional. “Program MBG bagus, niatnya mulia. Jangan sampai program yang baik ini ternoda oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya.

“Kalau ada penyelenggara bermasalah, ya hentikan, ganti pengelola, dan beri sanksi. Kalau perlu dihentikan operasionalnya selama 30 hari, supaya penyelenggara lebih berhati-hati,” imbuhnya.

Subandi juga meminta pemerintah pusat mendengarkan berbagai keluhan yang muncul di daerah. Menurutnya, perlu ada pembagian kewenangan yang lebih jelas agar pemerintah daerah tidak hanya diberikan tugas mengawasi, tetapi juga memiliki kewenangan yang memadai untuk menindaklanjuti temuan di lapangan. “Harus dibenahi dari akarnya. Perizinan wajib, pengawasan harus tegas, dan yang salah harus diganti,” pungkas Subandi.

Korban keracunan MBG di Sidoarjo tercatat mencapai 748 orang. Jumlah ini didasarkan dari update per Jumat, 4 September 2026 yang disampaikan Kepala Dinkes Kabupaten Sidoarjo dr. Lakhsmie Herawati Yuwantina. “Sebanyak 728 pasien telah diperbolehkan pulang dan menjalani rawat jalan. 20 pasien masih menjalani rawat inap atau MRS,” ujar Lakhsmie. (md/rus)



Bupati Subandi saat sidak SPPG di Sidoarjo.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

11 Tahun Warga Pranti Menanti Sertifikat Tanah, Tak Kunjung Tuntas di BPN



UNTUT HAK: Kepala Desa Pranti Eko Purnomo saat hearing dengan Komisi A bersama BPN Sidoarjo.

Relokasi dari Bandara Internasional Juanda

SEDATI-Sebelas tahun bukan waktu yang singkat untuk menunggu sertifikat tanah. Namun, kondisi itu dialami warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, Sidoarjo. Dari 97 pemohon yang mengurus sertifikat sejak 2015, hingga kini dokumen kepemilikan tanah tersebut belum juga diterbitkan. Persoalan ini mencuat dalam hearing Komisi A DPRD Sidoarjo yang mempertemukan Pemerintah Desa (Pemdes) Pranti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Sidoarjo di Ruang Rapat Komisi DPRD Sidoarjo, Selasa (8/9).

Kepala Desa Pranti Eko Purnomo mengatakan, proses pengurusan sertifikat warga telah berlangsung cukup panjang dan berulang kali dilakukan. Bahkan, dokumen permohonan disebut sudah sampai pada tahap peta bidang. Namun, proses tersebut kembali terkendala setelah terjadi pergantian

pimpinan di BPN Sidoarjo. "Tanah di Pranti ini bukan tanah bermasalah. Ini tanah relokasi dari Bandara Internasional Juanda. Bandara Juanda ini proyek nasional, bukan proyek swasta," tegas Eko dalam hearing.

Menurut Eko, pengurusan sertifikat sebenarnya telah dimulai sejak 2015. Dalam perjalanannya, Pemdes Pranti kembali diminta mencabut berkas lama karena dianggap sudah tidak berlaku. Saat berkas dicabut, Eko mengaku mendapat informasi bahwa produk sertifikat untuk warga sebenarnya sudah tersedia. Namun, dokumen tersebut belum ditandatangani karena pejabat yang berwenang telah berganti.

"Berkas ini sudah ada produk sertifikatnya, Pak. Cuma pimpinan BPN tidak mau tanda tangan dikarenakan pimpinannya sudah pindah semua," ungkapnya.

Pemdes Pranti kemudian mengikuti arahan untuk mengajukan kembali permohonan. Warga pun kembali dikenakan biaya Surat Perintah Setor

● Ke Halaman 10



11 Tahun Warga...

(SPS) sekitar Rp 100 ribu hingga Rp 150 ribu. Menurut Eko, nominal tersebut mungkin terlihat kecil. Namun, bagi warga Pranti yang mayoritas bekerja sebagai buruh tambak dan buruh bangunan, biaya tersebut tetap menjadi beban.

"Warga saya bukan orang kaya, Pak. Pendapatan mereka dari buruh tambak, bukan pemilik tambak. Ada yang buruh bangunan," katanya.

Lamanya proses pengurusan juga membuat warga kecewa. Sebagian dari 97 pemohon bahkan disebut telah meninggal dunia sebelum mendapatkan sertifikat yang mereka nantikan.

"97 orang ini, berapa orang yang

sudah meninggal? Nunggu sertifikat 11 tahun, enggak jadi-jadi," ujarnya dengan nada emosional.

Eko menegaskan, 97 pemohon tersebut bukan satu-satunya warga Pranti yang membutuhkan kepastian sertifikat. Setelah kelompok tersebut, masih ada sekitar 200 warga lain yang belum mengajukan sertifikat dan kini masih dalam proses pemberkasan. "Setelah 97, masih ada sekitar 200 orang yang belum mendapatkan sertifikat," jelasnya.

Untuk 97 pemohon tersebut, proses terbaru disebut sudah kembali memasuki tahap peta bidang. Bahkan, seluruh berkas telah memiliki peta bidang. Namun, persoalan kembali muncul karena masih diperlukan pemeriksaan dan kelengkapan administrasi.

Eko mempertanyakan mengapa proses sertifikasi harus kembali dari awal setiap kali terjadi pergantian pejabat.

"Pertanyaannya kepada BPN sebenarnya, kenapa kalau hanya pejabat yang lama tidak ada, apakah tidak diperkenankan untuk pejabat baru menandatangani sertifikat itu sebelum saya cabut berkas saya?" tanyanya.

Menanggapi persoalan tersebut, Kepala Seksi Wilayah IV Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo Suwoko mengatakan, pihaknya perlu mempelajari kembali seluruh berkas permohonan warga.

Ia menjelaskan, proses sertifikasi tanah terdiri atas sejumlah tahapan, mulai pengukuran, permohonan hak atas tanah, hingga pendaftaran.

Untuk kasus di Desa Pranti, tahap pengukuran disebut telah dilakukan. Selanjutnya, BPN akan meneliti permohonan hak atas tanah berdasarkan dokumen yang telah diajukan.

"Memang perlu untuk sertifikasi tanah ini, terus terang, perlu kami kaji lebih mendalam," kata Suwoko.

Suwoko mengaku masih tergolong baru menjabat sebagai Kepala Seksi Wilayah yang membawahi Kecamatan Sedati dan Buduran. Ia mulai menjabat pada 14 Agustus 2026.

Karena itu, ia perlu mempelajari riwayat permohonan warga Pranti sebelum menentukan langkah selanjutnya.

"Kami masih baru menjabat di sini. Kebetulan ini merupakan wilayah saya, sehingga saya harus mempelajari

jari betul permohonan-permohonan tersebut," ujarnya.

BPN kemudian memberikan waktu maksimal satu minggu untuk melakukan analisis terhadap berkas yang diajukan. "Satu minggu. Kalau analisisnya selesai sehari atau dua hari, ya sehari atau dua hari akan kami sampaikan," tegas Suwoko.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo Rizza Ali Faizin menilai persoalan antara Pemdes Pranti dan BPN lebih banyak dipicu miskomunikasi. Menurutnya, pergantian pejabat seharusnya tidak membuat pelayanan kepada masyarakat terputus. "Tadi sudah kita bahas bersama dan kedua belah pihak sudah saling memahami. Ternyata ini miskomunikasi," kata Rizza. (dik/vga)





INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

122 Bidang Lahan Flyover Gedangan Mulai Diukur

■ Pembangunan Fisik Tahun Depan

GEDANGAN-Pembangunan Flyover Gedangan memasuki tahapan lanjutan. Sebanyak 122 bidang lahan yang terdampak proyek jembatan layang tersebut mulai diukur dan dipetakan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo.

Pengukuran menjadi tahapan penting sebelum proses pembebasan lahan berlanjut ke penilaian harga tanah atau appraisal. Pemkab Sidoarjo meminta seluruh proses dipercepat agar pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.

Bupati Sidoarjo Subandi



PRIORITAS: Kondisi perempatan Gedangan yang menjadi langganan kemacetan setiap harinya.

mengatakan, pengukuran dan pemetaan bidang tanah merupakan bagian penting dalam persiapan pembangunan Flyover Ge-

dangan. Setelah seluruh bidang selesai diukur, proses akan dilanjutkan dengan appraisal.

“Pengukuran bidang

tanah menjadi tahapan yang harus segera dituntaskan sebelum masuk proses penilaian harga tanah atau appraisal. Se-

telah pengukuran dan pemetaan selesai, akan dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin prosesnya dipercepat sehingga pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak molor,” ujar Subandi, Rabu (9/9).

Di lapangan, petugas BPN bersama Pemkab Sidoarjo melakukan pengukuran secara bertahap dengan menyusuri jalur utama yang masuk dalam kawasan proyek. Pengukuran mencakup sejumlah titik, mulai dari kawasan perempatan hingga sisi utara dan timur yang terdampak pembangunan.

Untuk mendukung pembebasan lahan, Pemkab Sidoarjo telah menyiapkan anggaran Rp 225 miliar melalui APBD 2026. Dana tersebut dialokasikan

● Ke Halaman 10

layout: hadi



122 Bidang Lahan...

untuk proses pembebasan lahan proyek Flyover Gedangan.

Namun, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai sekitar Rp 450 miliar. Artinya, anggaran yang tersedia pada tahun ini belum mencakup seluruh ke-

butuhan pembebasan lahan.

“Dana segitu belum cukup, karena diperkirakan butuh sekitar Rp 450 miliar. Kekurangannya atau kebutuhan dana yang belum terselesaikan tahun ini akan dilanjutkan melalui penganggaran pada 2027,” jelasnya.

Pemkab Sidoarjo menargetkan selu-

ruh proses pembebasan lahan dapat dituntaskan pada 2026. Setelah tahapan pengukuran, pemetaan, appraisal, hingga pembayaran ganti rugi selesai, pembangunan fisik Flyover Gedangan ditargetkan mulai dikerjakan pada 2027.

Pembangunan flyover tersebut menjadi salah satu upaya Pemkab Sidoarjo

untuk mengurai kepadatan lalu lintas di jalur utama Surabaya-Sidoarjo. Kawasan Gedangan selama ini menjadi salah satu titik yang kerap mengalami kemacetan, terutama akibat tingginya volume kendaraan.

Dengan dimulainya pengukuran 122 bidang lahan, Pemkab Sidoarjo berha-

rap proses pembebasan lahan segera berlanjut ke tahap appraisal dan pembayaran ganti rugi. Dengan begitu, pembangunan fisik flyover dapat dimulai sesuai target pada 2027. “Pembayaran lahan tuntas pada 2026, kemudian pembangunan fisik dimulai tahun 2027,” tegasnya. (dik/vga)





DELTRAS SIDOARJO

OPTIMISTIS: Pemain Deltras FC Sidoarjo siap menghadapi kompetisi Liga 2 Championship 2026/2027.

Skuad Baru Ambisi Besar

KOTA-Deltras FC Sidoarjo menghadapi kompetisi Liga 2 Championship 2026/2027 dengan skuad baru dan ambisi besar. The Lobster, julukan Deltras FC, telah memperkenalkan 30 pemain yang akan menjadi bagian dari perjuangan tim sepanjang musim ini.

Komposisi skuad Deltras cukup menarik. Sejumlah pemain berpengalaman yang pernah memperkuat klub Liga 1 turut bergabung.

Di antaranya kiper Abdul Rohim, Marckho Sandi Merauje, Mohammad Bagus Nirwanto, Mochammad Shulton Fajar, hingga gelandang Rizky A S Pellu.

Kehadiran pemain-pemain tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas permainan sekaligus menambah mental bertanding Deltras di kompetisi kasta kedua sepak bola Indonesia.

Selain mengandalkan pemain berpengalaman, Deltras juga memberikan ruang bagi pemain muda. Perpaduan pengalaman dan energi pemain muda diharapkan membuat kedalaman skuad The Lobster semakin solid di setiap lini.

Penjaga Gawang diisi oleh Samuel Reimas (29), Abdul Rohim (33), Hafizd Fauzan Muzakki (21) dan Rafi Ardiono (81), Pemain Belakang: Muhammad Idris (13), Reza Wili Saputra (35), Christian Deo Putra Lambok

(31), Taher Jahanbakhsh (4), Muhammad Dani Ibrohim (45), Marsel Yusuf Usemahu (17), Raditya Rahardjo (16), Marckho Sandi Merauje (26), Achmad Dwi Firmansyah (15) dan Mohammad Bagus Nirwanto (3)

Untuk gelandang: Mochammad Shulton Fajar (87), Rizky A S Pellu (19), Rafly Junior Dwi Udayana (27), Ichlasul Qadri (5), Gading Mahardian Kristanto (28), Ichsan Pratama (22), dan Rian Lopes (77)

Untuk pemain Sayap: Hamdi Sula (23), Nathan Ari (30), Aqil Agustian (32), Wigi Pratama (11), dan I Ketut Dedi (25). Sedangkan untuk penyerang Muhammad Aulia Rahman Arif (20), Nader Mohcine Hassan (10), Muhammad Irman (9) dan Martinus Novianto (18).

Dengan komposisi tersebut, Deltras memiliki kedalaman pemain yang cukup merata di setiap posisi. Pengalaman pemain senior dan eks Liga 1 berpadu dengan tenaga pemain muda menjadi modal The Lobster untuk bersaing di Liga 2 Championship 2026/2027.

Skuad ini juga menjadi bagian dari proyek Deltras untuk membangun tim yang lebih kompetitif. Dukungan publik Sidoarjo dan atmosfer Stadion Gelora Delta diharapkan menjadi tambahan motivasi bagi The Lobster. (dik/vga)

THE LOBSTER



Gus Rizza didampingi Elok Suciwati dari Fraksi PKB mengunjungi pasien santri di RSUD.

Fraksi PKB Kunjungi Santri Keracunan MBG

Sidoarjo, Memorandum

Seiring dengan kondisi para pasien yang terus membaik secara bertahap, jumlah santri yang opname di masing-masing rumah sakit kini terus berkurang secara signifikan. Termasuk beberapa santri yang menjalani rawat inap di RSUD RT Notopuro mayoritas telah diperbolehkan pulang.

Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo dari Fraksi PKB, H. Rizza Ali Faizin didampingi Elok Suciwati meninjau langsung penanganan santri ponpes korban keracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) di RSUD guna memastikan kondisi terkini pasien santri yang masih menjalani rawat inap (opname), Selasa (8/9).

H Rizza Ali Faizin atau akrab disapa Gus Rizza mengatakan, bahwa keselamatan jiwa adalah prioritas. Jadi kedatangannya ke RSUD untuk memberikan support full kepada Ponpes Mambaul Hikam Tanggulangin, pascakeracunan massal program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan memastikan kondisi terkini santri yang masih menjalani rawat medis di rumah sakit.

"Tadi saya sudah melihat langsung dan berbincang dengan tim medis. Sebagian besar korban sudah ditangani dengan baik oleh pihak rumah sakit. Ada yang kon-

disinya mulai stabil, namun ada beberapa yang masih membutuhkan perawatan. Sehubungan dengan ini, kami memastikan pelayanan medis berjalan maksimal," kata Gus Rizza.

Selasa pagi ini, lanjut Gus Rizza, hanya tinggal dua santri pasien yang masih menjalani rawat inap di dua rumah sakit di Sidoarjo, di antaranya 1 di RS Siti Hajar dan 1 di RSUD.

"Alhamdulillah per pagi ini masih ada 2 pasien santri yang harus kembali dan menjalani rawat inap, 1 santri dari Jombang 1 santri lainnya dari Kecamatan Candi," tandasnya.

Sebelumnya, diketahui dugaan keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang berdampak pada ratusan santri di Sidoarjo menyita banyak perhatian publik dan menjadi alarm keras bagi pemerintah kabupaten setempat.

Sementara jumlah korban tercatat terus bertambah hingga mencapai lebih dari 700 santri. Mereka (korban) dilarikan ke beberapa rumah sakit, antara lain RSUD (merupakan rumah sakit dengan jumlah pasien terbanyak), RS Siti Hajar, RS Delta Surya, RS Pusurq, RSU Aisyiyah Siti Fatimah Tulangan, RS Pusdik Bhayangkara Porong, RS Arafah Anwar Medika. (hum/jok/fdn)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Satgas Pengawasan SPPG Pastikan MBG Aman

Sidoarjo, Memorandum

Bupati Sidoarjo Subandi menegaskan komitmen Pemerintah dalam mendukung sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya.

Pertemuan tersebut membahas pemantauan perkembangan politik di daerah terkait monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG serta peningkatan pelayanan dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta digelar di Pendopo Delta Wibawa, Selasa (8/9).

Bupati menyampaikan pro-

gram MBG merupakan salah satu program strategis nasional. MBG memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.

Menurutnya, pelaksanaan program MBG tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas generasi penerus bangsa.

"Program makan bergizi



Bupati Sidoarjo Subandi didampingi Forkopimda.

gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo," tegasnya.

Bupati menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai dinamika yang harus menjadi perhatian bersama. Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas serta

keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat. Karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting.

Tujuannya, memastikan berbagai persoalan di lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan yang nyata. Pengawasan tidak cukup dilakukan dengan koordinasi saja. Harus pula dipastikan bahwa seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standard operational procedure (SOP).

Termasuk, pentingnya memastikan kelengkapan perizinan SPPG sejak sebelum menjalankan kegiatan. Dia meminta SPPG yang proses perizinannya belum selesai agar segera menuntaskannya.

"Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan," tegasnya. (sud/jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Desa Jimbaran Wetan Wonoayu Rencanakan Pembangunan 2027

Sidoarjo, Memorandum

Demi menunjang kemajuan pembangunan yang ada di desa, Pemerintah Desa Jimbaran Wetan, Wonoayu menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) tahun anggaran 2027.

Acara yang dilaksanakan di kantor desa, Selasa (8/9) malam, dihadiri Sekretaris Kecamatan Wonoayu, Kasi Pembagian Kecamatan Wonoayu, BPD, LPMD, RT/RW, pendamping desa, Babinsa, Bhabin, Bhabinkamtibmas, tokoh masyarakat, dan warga setempat.

Musrenbangdes merupakan salah satu kegiatan penting dalam perencanaan pembangunan di tingkat desa yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam menentukan prioritas pembangunan.



Musrenbangdes Desa Jimbaran Wetan di kantor desa.

Kepala Desa Jimbaran Wetan, Hj Umilatin menyampaikan pentingnya Musrenbangdes menjadi ruang penampung aspirasi warga untuk turut merencanakan program pembangunan desa. Selain pembangunan, Musrenbangdes juga diselenggarakan untuk membahas

kepentingan dan kemajuan desa.

"Musrenbangdes dalam rangka menyusun RKPD desa yang diaplikasikan pelaksanaannya pada 2027 mendatang. Agar pembangunan yang menggunakan dana APBN maupun APBD tepat sasaran, sehingga masyarakat akan merasakan hasil dari program pemerintah," ujarnya.

Sekretaris Kecamatan Wonoayu, Aan Alifauzansyah menyam-

paikan, dalam Musrenbangdes, semua pemangku kepentingan di desa termasuk perwakilan pemerintah desa, masyarakat, serta tokoh-tokoh desa bersama-sama menentukan skala prioritas kegiatan yang direncanakan.

Hasil dari musrenbang di tingkat desa ini akan menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPD) serta turut menjadi acuan untuk perencanaan di tingkat kecamatan, kabupaten, hingga pusat.

Aan Alifauzansyah menjelaskan. Tujuan utama dari Musrenbangdes adalah untuk memastikan aspirasi masyarakat di tingkat desa dapat ditampung dan diakomodasi dalam perencanaan pembangunan.

Desa menyusun prioritas kegiatan yang dinilai paling penting untuk segera dilaksanakan sesuai dengan hasil musyawarah desa

yang telah dilaksanakan. Kegiatan ini nantinya akan didanai oleh Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa, atau melalui swadaya masyarakat yang akan dituangkan ke dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Apbdes).

Desa dapat menginventarisasi masalah-masalah yang perlu diatasi, seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya yang belum terpenuhi serta kebutuhan ketahanan pangan sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Melalui Musrenbang, dengan melibatkan semua pihak, diharapkan pembangunan di Desa akan semakin berdaya guna, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata," tandasnya. (id/jok/fdn)

MEMORANDUM
BEKERJA DAN MEMBELA TANAH AIR



alikusyanto/Bhirawa

M Rafi Wibisono, Ketua umum KONI Sidoarjo, menggelar rapat koordinasi dengan para pengurus KONI Sidoarjo.

Sidoarjo Siapkan Lima Strategi Kemenangan Porprov 2027

Sidoarjo, Bhirawa

Sidoarjo wayahe juara. Semangat ini terus disosialisasikan kepada semua para pegiat olah raga di Kabupaten Sidoarjo untuk berlaga pada Porprov Jatim ke-X Tahun 2027 tahun depan. Sidoarjo pantas menyandang juara, karena selama Porprov Jatim berlangsung posisi Sidoarjo selalu berada dalam lingkaran tiga besar. Hasil terakhir dalam Porprov 2025 lalu, Sidoarjo berada pada urutan ke-3 setelah Kota Malang. Pada tahun 2027 yang akan digelar di Kota Surabaya nanti, akan ditarget untuk merebut kembali posisi Runner up seperti pada Porprov VIII tahun 2023 lalu.

Ketua umum KONI Sidoarjo yang baru saja mendapat nahkoda baru, M.Rafi Wibisono, akan menyiapkan lima strategi untuk meraih kemenangan dalam Porprov 2027 nanti. "Kami tidak akan lama-lama, karena Porprov 2027 semakin dekat, kami akan menyiapkan strategi yang cepat dan terukur, kami ingin cita-cita Sidoarjo menjadi juara bisa tercapai," kata Rafi, saat rapat koordinasi dengan para pengurus KONI Sidoarjo, Selasa (8/9) kemarin, di Kantor KONI Sidoarjo.

Apa strateginya? Semuanya sudah dalam skenario yang telah disusun dengan rapi oleh bidang prestasi KONI Sidoarjo. Untuk mewujudkan Sidoarjo kembali menjadi juara, tentu saja Rafi mohon dukungan semua pegiat Olah raga di Sidoarjo, mulai dari para pengurus KONI, juga para pengurus cabang olahraga di Sidoarjo. Sebagai catatan, pada Porprov Jatim IX 2025 di Malang Raya, Sidoarjo berada pada peringkat ketiga setelah Kota Malang. Dengan mengantongi 87 medali emas, 86 medali perak dan 117 medali perunggu atau 653 poin. Pada saat itu, tim Sidoarjo mengerahkan 1.400 kontingen, dengan 1.322 atlet. Sidoarjo mengikuti 67 Cabor yang dipertandingkan. [kus.wwn]

Dibentuk Satgas Pengawasan, Bupati Berharap Program MBG Sukses

Sidoarjo, Bhirawa

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sukses di Kabupaten Sidoarjo. Bupati Sidoarjo Subandi mengajak masyarakat dan OPD di Pemkab Sidoarjo harus bersama-sama mendampingi dan memastikan program ini berjalan dengan baik. Sehingga tak terulang kembali keracunan kepada para siswa dan santri di wilayah Sidoarjo.

Bupati berencana membentuk Satuan Tugas (Satgas) tingkat Kabupaten Sidoarjo. Dan Satgas ini diharapkan dapat melakukan pengawasan secara lebih terkoordinasi, mulai perangkat daerah terkait, kecamatan dan desa.

“Program MBG merupakan program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” katanya, saat mengumpulkan para Pimpinan OPD, Selasa (8/9) kemarin, di Pendopo Delta Wibawa, Sidoarjo

Dikumpulkannya SPPG dan Pimpinan OPD untuk membahas perkembangan politik di daerah terkait monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan Program MBG, serta peningkatan pelayanan dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Turut hadir seluruh Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah SPPG Surabaya.

Subandi menjelaskan, pengawasan tidak hanya masalah bahan makanan dan proses pengolahan, tetapi juga pengawasan pada perizinan SPPG sejak sebelum menjalankan kegiatan. SPPG yang proses perizinannya belum selesai harus segera menuntaskannya. [kus.fen]



Semua Pengelola SPPG di Sidoarjo diundang hadir ke Pendopo Kabupaten Sidoarjo untuk mendapatkan pesan-pesan dari Bupati Sidoarjo.

alikusyanto/bhirawa.



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

Warga Soroti Pengelolaan TPST Sidokerto, Buduran

Sidoarjo, Pojok Kiri

Sejumlah warga Desa Sidokerto, Kecamatan Buduran, menyoroti pengelolaan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di desa setempat. Warga mempertanyakan transparansi pengelolaan sampah, termasuk penggunaan dana retribusi yang selama ini ditarik dari masyarakat.

Sorotan tersebut mencuat karena warga menduga pengelolaan TPST selama beberapa tahun terakhir tidak melibatkan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sebelumnya telah dibentuk.



Tempat Pengolahan Sampah Terpadu Desa Sidokerto, Sidoarjo.

Bahkan, pengelolaan sampah disebut beralih kepada salah satu perangkat desa.

Salah satu warga Sidokerto, Khusein, mengatakan persoalan tersebut telah berlangsung cukup lama. Menurutnya, selama sekitar tujuh tahun pengelolaan sampah berada di tangan perangkat desa, sementara masyarakat tidak mengetahui secara jelas penggunaan hasil penarikan retribusi.

“Selama kurang lebih tujuh tahun pengelolaan sampah dipegang perangkat desa.

● Bersambung Hal. 11

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

Warga Soroti Pengelolaan TPST Sidokerto, Buduran

● Sambungan Hal 1

Kami sebagai warga tidak mengetahui hasil retribusi itu digunakan untuk apa. Selama itu juga tidak ada pertanggungjawaban yang disampaikan kepada masyarakat,” ujar Khusen.

Ia menilai transparansi sangat diperlukan agar masyarakat mengetahui secara jelas mekanisme pengelolaan TPST, mulai dari penarikan retribusi, biaya operasional hingga penggunaan sisa dana.

“Yang kami pertanyakan bukan hanya soal siapa yang mengelola, tetapi juga transparansinya. Kalau ada retribusi dari masyarakat, harus jelas peruntukannya dan ada pertanggungjawaban,” katanya.

Sementara itu, Gatot, anggota KSM Desa Sidokerto, mengungkapkan bahwa KSM tersebut sebelumnya dibentuk oleh pemerintahan desa sebelumnya untuk membantu pengelolaan sampah.

Menurut Gatot, setelah terjadi pergantian kepala desa dan Nasihin menjabat sebagai kepala desa, keberadaan KSM tersebut tidak lagi difungsikan. Namun, kata dia, hingga kini tidak pernah menerima infor-

masi mengenai pembubaran KSM secara resmi.

“KSM ini dibentuk oleh pemerintahan sebelumnya. Setelah berganti kepala desa dan Pak Nasihin menjabat, KSM tidak lagi difungsikan. Tiba-tiba pengelolaan sampah beralih ke perangkat desa, sementara kami tidak pernah menerima SK pembubaran KSM,” ungkap Gatot.

Gatot berharap pemerintah desa memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status KSM serta mekanisme pengelolaan TPST dan retribusi sampah yang selama ini berjalan.

“Kalau memang KSM sudah tidak difungsikan, seharusnya ada kejelasan secara resmi. Jangan sampai masyarakat bingung karena sebelumnya sudah ada KSM, kemudian tidak difungsikan tanpa penjelasan,” ujarnya.

Warga berharap persoalan tersebut dapat segera diklarifikasi oleh Pemerintah Desa Sidokerto. Mereka juga mendorong adanya keterbukaan terkait pengelolaan TPST dan dana retribusi agar pengelolaan sampah berjalan profesional, transparan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan desa. (Gat)

Kelola Sampah Gercep, Wabup Mimik Minta TPST Desa Krembung Ditiru Desa Lain

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

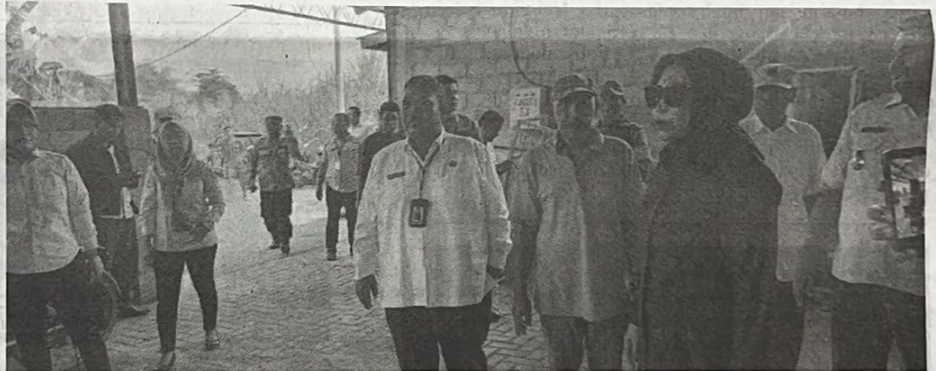
Mendapat laporan kelola sampah secara cepat, Wakil Bupati Sidoarjo Hj. Mimik Idayana, S.AP., melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Desa Krembung, Kecamatan Krembung, Rabu (9/9). Dalam kunjungannya, Wabup Mimik mengapresiasi pengelolaan sampah yang dinilai bersih, tertata, dan minim dampak lingkungan.

Menurut Mimik, kondisi TPST Desa Krembung berbeda dengan sejumlah tempat pengelolaan sampah yang selama ini ditemuinya. Ia mengaku terkesan karena lokasi tersebut tidak dipenuhi alat maupun menimbulkan polusi udara.

“Baru kali ini saya menjumpai TPST yang bersih, tidak ada alat di mana-mana dan terbebas dari polusi udara,” kata Wabup Mimik.

Lebih lanjut Wabup Mimik menilai sistem pengelolaan sampah yang diterapkan Pemerintah Desa Krembung patut diapresiasi. Sampah yang diambil dari rumah-rumah warga langsung dibawa ke TPST untuk dipilah dan dikelola secara cepat tidak sampai tiga jam, sehingga tidak menumpuk terlalu lama.

“Alhamdulillah, di sini sampah datang langsung dikelola. Bahkan sekitar pukul 09.00 WIB



sudah clear. Mudah-mudahan gebrakan Desa Krembung ini bisa ditularkan ke desa-desa lainnya,” katanya.

Wabup Mimik berharap pola pengelolaan sampah yang diterapkan Desa Krembung dapat menjadi contoh bagi desa lain di Kabupaten Sidoarjo. Menurutnya, keberhasilan tersebut membuktikan bahwa pengelolaan sampah di tingkat desa dapat dilakukan secara efektif apabila dikelola dengan serius.

“Ini salah satu contoh keberhasilan di Desa Krembung. Desa lain juga harus bisa meniru. Kalau Desa Krembung bisa, kenapa desa lainnya tidak bisa,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Wabup Mimik juga menyam-

paikan bahwa sarana pendukung pengelolaan sampah di Desa Krembung masih perlu ditingkatkan. Saat ini, operasional pengangkutan sampah masih menggunakan kendaraan sewaan.

Ia berharap bantuan kendaraan pengangkut sampah dapat segera direalisasikan sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.

Kades Krembung Salmiati saat beri penjelasan

Kepala Desa Krembung, Salmiati, menjelaskan bahwa para petugas TPST memiliki semangat tinggi dalam menjaga kebersihan dan mengelola sampah yang berasal dari masyarakat.

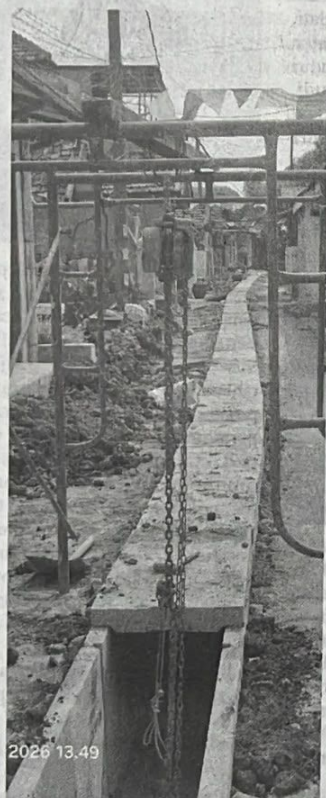
“Petugasnya masing-masing

sangat antusias dan semangat. Sampah yang baru diambil dari warga langsung dibawa ke TPST dan dikelola,” jelas Salmiati.

Menurutnya, sampah yang masih dapat dimanfaatkan akan dipilah, sementara sampah yang tidak dapat digunakan kembali akan ditangani sesuai sistem pengelolaan yang diterapkan di TPST.

Salmiati menyebut proses pengelolaan sampah berlangsung relatif cepat. Sampah yang masuk setiap hari diupayakan tidak sampai menumpuk dan dapat diselesaikan dalam hitungan jam.

“Tidak sampai satu hari sudah selesai. Sekitar pukul 10.30 WIB sudah selesai, jadi kurang lebih tiga jam,” pungkasnya. (Nang)



Antisipasi Genangan Air, Pemerintah Kelurahan Sekardangan Lakukan Pekerjaan Pemasangan U-Dite

Sidoarjo, Pojok Kiri.-

Lingkungan yang bersih dan sehat adalah suatu keadaan dimana lingkungan tersebut bebas dari kotoran dan penyakit sehingga lingkungan tersebut berdampak buruk bagi masyarakat.

Selain itu aspek lingkungan itu sendiri memberikan peran penting dalam menciptakan lingkungan bersih yang sehat, seperti ketersediaan saluran Drainase pada jalan lingkungan kelurahan, jika struktur tanah lingkungan itu rendah maka ketika musim penghujan tiba maka musim penghujan di lingkungan tersebut dengan mudah cepat tergenang air, di samping itu jalan lingkungan yang sering tergenang air dalam waktu yang lama akan mempengaruhi kekuatan struktur tanah jalan tersebut.

Berdasarkan uraian singkat

diatas, dengan melihat situasi lingkungan masyarakat Kelurahan Sekardangan kecamatan Sidoarjo kalau musim hujan sering tergenang air hujan, maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dibangun infrastruktur resapan yang memadai, maka sesuai dengan program kerja kelurahan, pemerintah Kelurahan Sekardangan merealisasikan pembangunan saluran Drainase dengan infrastuktur U - Ditch pada Wilayah rawan genangan air dengan tujuan menyediakan infrastuktur tepat guna bagi masyarakat pada saat musim hujan, serta menciptakan estetika lingkungan dan menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

Dalam keteranganya pelaksana pekerjaan menyampaikan "Pemasangan Drainase U - Dite dengan menggunakan pelat penutup yang dibuat sesuai dengan

garis dan elevasi dan detail lainnya yang ditunjukkan dalam Gambar, untuk Bagian permukaan dari saluran terbuka atau bagian permukaan pelat penutup kami laksanakan dengan profil yang rata" terangnya Sabtu (9/9).

Setelah U - Dite terpasang Pada bagian sambungan kita tutup dengan Mortar dan yang belum terisi harus diisi dengan adukan, di lanjutkan dengan Penimbunan kembali pada lokasi galian pemasangan pada U - Dite" tambahnya.

"Untuk Timbunan, dengan menggunakan bahan yang memenuhi ketentuan yang diberikan untuk Timbunan Pilihan, Bahan dari sirtu timbun atau kerikil yang bebas dari gumpalan lempung dan bahan - bahan tetumbuhan serta yang tidak mengandung batu yang tertahan pada ayakan 25 mm," pungkasnya. (Nang)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT

BUPATI SUBANDI BENTUK SATGAS PENGAWASAN SPPG UNTUK PASTIKAN PROGRAM MBG BERJALAN AMAN DAN BERKUALITAS

Sidoarjo, Pojok Kiri,-

Bupati Sidoarjo H. Subandi SH MKn menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam mendukung sekaligus memperkuat pengawasan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin rapat koordinasi dengan Forkopimda Sidoarjo, Forkopimka, serta seluruh koordinator wilayah (korwil) SPPG se-Kabupaten Sidoarjo dan Koordinator Wilayah KPPG Surabaya.

Pertemuan tersebut membahas pemantauan perkembangan politik di daerah terkait monitoring dan evaluasi dinamika pelaksanaan program MBG serta peningkatan pelayanan dan kinerja Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Pendopo Delta Wibawa pada Selasa (8/9/2026).

Bupati Subandi menyampaikan bahwa program MBG merupakan salah satu program strategis nasional. MBG memiliki tujuan besar dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak usia dini melalui pemenuhan kebutuhan gizi yang sehat, aman, dan berkualitas.

Menurut Bupati Subandi, pelaksanaan program MBG tidak sekadar berkaitan dengan penyediaan makanan, tetapi juga memiliki keterkaitan dengan sektor kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta penguatan kualitas generasi penerus bangsa.

“Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program strategis nasional. Tentu kita terus mendukung penuh agar program ini sukses di Sidoarjo,” tegasnya.



Bupati Subandi menjelaskan, dalam pelaksanaannya, terjadi berbagai dinamika yang harus menjadi perhatian bersama. Mulai kesiapan dan kapasitas SPPG, penyediaan bahan makanan, kualitas serta keamanan makanan, distribusi, penetapan penerima manfaat, hingga pelayanan dan komunikasi kepada masyarakat.

Karena itu, monitoring dan evaluasi sangat penting. Tujuannya, memastikan berbagai persoalan di

lapangan dapat segera diidentifikasi, dikoordinasikan, dan dicarikan solusi secara bersama-sama.

Bupati Subandi menekankan, dukungan pemerintah daerah terhadap program MBG harus dibarengi dengan pengawasan yang nyata. Pengawasan tidak cukup dilakukan dengan koordinasi saja. Harus pula dipastikan bahwa seluruh SPPG menjalankan tugas sesuai standard operational procedure (SOP).

Termasuk, pentingnya memastikan kelengkapan perizinan SPPG sejak sebelum menjalankan kegiatan. Dia meminta SPPG yang proses perizinannya belum selesai agar segera menuntaskannya.

“Kalau ada kegiatan, perizinan harus dilakukan terlebih dahulu. Kita harus memastikan apakah SPPG itu layak atau tidak. Jangan sampai kegiatan sudah berjalan, izinnya baru dijalankan,” tegasnya. (Khol/Dy)



INFO MEDIA PERS

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO



KOMISI A DPRD SIDOARJO DORONG PADA BPN SEGERA SELESAIKAN 299 SERTIFIKAT WARGA PRANTI YANG MACET 11 TAHUN



H. RIZZA ALI FAIZIN, M.Pd.I.
Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo

Sidoarjo - Pojok Kiri, Kepastian kepemilikan tanah warga Desa Pranti, Kecamatan Sedati, kembali menjadi perhatian DPRD Kabupaten Sidoarjo. Komisi A DPRD Sidoarjo yang dihadiri Rizza Ali Faizin, Raymond Tara Wahyudi, Saifuddin Affandi, Achmad Mujayyin, Rizal Fuady, Deny Haryanto dan Aditya Indra Putra Muallim ini menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mempertemukan Pemerintah Desa Pranti dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sidoarjo terkait proses penerbitan sertifikat tanah warga yang hingga kini belum



rampung. Persoalan tersebut berkaitan dengan warga yang menempati lahan relokasi akibat perluasan Bandara Juanda sejak 1997. Proses pengurusan dokumen pertanahan disebut telah berlangsung cukup lama dan belum memberikan kepastian kepada masyarakat. Kepala Desa Pranti, Eko Purnomo SH, mengatakan, persoalan tersebut bukan kali pertama dibahas bersama DPRD. Menurutnya, Pemerintah Desa Pranti sebelumnya juga telah mengikuti sejumlah

arahan dari BPN Sidoarjo untuk menyelesaikan proses administrasi pertanahan warga. Eko menyebut pada 2023 pihak desa kembali mengikuti proses yang diarahkan BPN, termasuk melakukan pencabutan berkas pendaftaran yang diajukan pada 2015 karena dinyatakan tidak lagi berlaku. "Waktu itu kami mengikuti semua petunjuk BPN, termasuk mencabut berkas pendaftaran tahun 2015. Namun saat proses pencabutan, saya melihat fisik sertifikat sebenarnya sudah dicetak. Hanya saja saat itu belum ditandatangani karena adanya pergantian pimpinan," ujar Eko dalam hearing. Menurut Eko, persoalan tersebut kemudian mengharuskan warga mengajukan kembali proses administrasi. Warga juga kembali dikenakan biaya melalui Surat Perintah Setor (SPS). Ia berharap persoalan tersebut segera mendapatkan penyelesaian



RAYMOND TARA WAHYUDI, S.T.
Anggota Komisi A DPRD Sidoarjo

tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh persyaratan terpenuhi sekaligus menentukan proses selanjutnya sesuai ketentuan yang berlaku. Ketua Komisi A DPRD Sidoarjo, Rizza Ali Faizin mengatakan, hearing tersebut menjadi ruang untuk memperjelas persoalan yang selama ini belum menemukan titik temu antara pemerintah desa dan BPN. Menurutnya, perbedaan pemahaman mengenai proses administrasi seharusnya dapat diminimalkan melalui komunikasi dan koordinasi yang lebih baik. "Dari hasil rapat, kedua pihak sudah saling memahami. BPN berkomitmen menyelesaikan proses verifikasi dalam waktu sekitar satu minggu, sementara pemerintah desa siap melengkapi apabila masih ada dokumen yang diperlukan," jelas Rizza. Rizza meminta proses pelayanan pertanahan tetap mengedepankan ketelitian dan kepatuhan terhadap aturan. Namun, ia juga mendorong agar proses administrasi yang menjadi hak masyarakat tidak berlarut-larut. Komisi A DPRD Sidoarjo akan mendorong agar hasil verifikasi BPN dapat segera ditindaklanjuti. Pemerintah desa juga diminta aktif berkoordinasi apabila terdapat kekurangan dokumen yang harus dilengkapi. Dengan adanya kesepakatan tersebut, penyelesaian administrasi pertanahan warga relokasi Desa Pranti diharapkan dapat segera menemukan kejelasan. Kepastian tersebut dinilai penting agar masyarakat memperoleh kejelasan mengenai status dan hak atas tanah yang mereka tempati. (Khol/ADV)

POJOK KIRI
KORAN RAKYAT